



» PENYALAHGUNAAN PROGRAM

Soal KMS, Forpi Lapor ke Dinsos

JOGJA—Menindaklanjuti temuan calon siswa SMP jalur siswa tidak mampu atau Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) yang diduga tidak tepat sasaran, Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Sosial Kota Jogja, Kamis (4/7).

Hal yang jadi fokus laporan adalah pada dua temuan, yakni di SMPN 4 Jogja dan SMPN 15 Jogja. Di SMP N 4 Jogja, Forpi mendapati calon siswa datang ke sekolah bersama orang tua menaiki motor Yamaha N-Max yang tergolong cukup mahal khususnya untuk pemegang kartu KMS.

Sedangkan di SMPN 15, ditemukan beberapa siswa yang terlihat bermain ponsel dengan seri yang cukup memainkan gim *online* berkapasitas besar.

Jika mengacu pada pendataan penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), salah satu parameter pemegang KMS adalah keluarga yang tidak memiliki barang dengan nilai lebih dari Rp1,8 juta.

Parameter ini, kata dia, berbobot empat poin. Selain itu masih ada 15 parameter lagi dengan bobot yang berbeda-beda. Pemegang KMS adalah keluarga dengan jumlah skor parameter ini antara 31-100 poin.

"Jika berpapasan pada parameter tersebut, kami menilai orang tua maupun siswa yang jadi temuan kami ini tidak masuk dalam penerima KMS. Pakaian dan tasnya juga tidak mencerminkan KMS," kata Koordinator Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba.

Ia mengatakan, kedua temuan ini hanya sampel dari seluruh proses pendataan jalur tidak mampu di Kota Jogja. Dengan adanya temuan itu, ia menduga terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KMS.

Maka ia meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jogja untuk lebih ketat dalam pendataan KSJPS, agar penerima KMS adalah mereka yang benar-benar berhak.

Kepala Dinsos Jogja, Agus Sudrajat, mengatakan terkait KSJPS, Dinsos telah membangun sistem beserta *filter* untuk mendata dan memastikan data itu valid.

Selama setahun, Dinsos mendata dengan menggunakan dua kali uji publik. Verifikasi pun dilakukan oleh 4-5 petugas di tiap kelurahan. Pada uji publik, Dinsos melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memastikan data yang didapat valid.

Meski demikian ada dua hal yang masih menjadi potensi tidak tepatnya penyaluran KMS, yakni mentalitas masyarakat dan ketelitian verifikasi.

"Karena itu, kejujuran masyarakat sangat diperlukan, khususnya dari anggota keluarga yang ditemui saat pendataan dan tokoh masyarakat seperti RT dan RW. Pada saat uji publik, tokoh masyarakat berperan memberi informasi sesuai kondisi riil," katanya. (Lugas Subarkah)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005